



POLICY BRIEF - KERTAS KEBIJAKAN 5

Aksi Menuju
Pembangunan Berkelanjutan
dalam Masa Pandemi

**Menangani Dampak Sosial
Pandemi COVID-19 di Masa
Adaptasi Kebiasaan Baru**

Publikasi ini disusun sebagai bagian dari proyek Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di 30 pemerintah daerah (16 Provinsi dan 14 Kota), bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan didukung secara finansial oleh Uni Eropa.

LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.



Didukung oleh pendanaan hibah dari:



Didukung oleh:



Disusun oleh:



Sekretariat UCLG ASPAC:

Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta 10110, Indonesia, Tel. (62-21) 389 01801 Fax. (62-21) 389 01802,

Email: secretariat@uclg-aspac.org, Situs: www.uclg-aspac.org | <https://localisedsgs-indonesia.org/>

Foto Sampul:

Bermain Wayang Golek di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Fotografer: Bastian AS & Tim

Tim Peneliti:

SDGs Center Universitas Lampung: Dr. Unang Mulkhan (Ketua), Dr. HS Tisnanta, Dr. Emir Chairullah, Natasya Kusumawardani, MProfStuds., Budi Kurniawan, MPP., Prasetya Nugeraha, MAB.

Penyunting Naskah:

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Rahmi Dwi Nydia, Imam Wisaya Surataruna, Aniessa Delima Sari, Rona Ikram Putri

Penerjemah:

Dimas Primacahyadi

Kontributor:

Indah Sri Wibi Nastiti, Teguh Ardhiwiratno (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia – APEKSI), Aniessa Delima Sari, Hendra Susila Adi, Vidya Kartika, Cemara Dinda (UCLG ASPAC), Rona Ikram Putri

Pembahas riset:

Ir. Tubagus Ahmad Choesni, M.A., M.Phil. (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Ir. Freddy SM, M.M. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Desainer Grafis:

Derick Prawira

Latar Belakang

Seperti noda kelam di catatan sejarah, pada tahun 2020 dunia menghadapi guncangan luar biasa. Pandemi COVID-19 tak hanya merenggut nyawa manusia, tapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat global. Angka kemiskinan meningkat tajam, banyak negara masuk ke jurang resesi¹, lapangan kerja berkurang, dan perekonomian dunia menghadapi tantangan salah satu tantangan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Laporan terbaru Bank Dunia bahkan memperkirakan 115 juta orang di seluruh dunia akan jatuh miskin, jumlah tertinggi sejak krisis ekonomi pada 1998².

Guncangan sosial lain yang muncul selama pandemi COVID-19 adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak³. Lebih jauh lagi, pandemi ini juga menambah beban kerja perempuan dalam keluarga⁴ dan membuat angka putus sekolah melonjak⁵.

Kenyataan pahit ini menunjukkan bahwa pandemi telah menghambat pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah komitmen global dan nasional yang berupaya menyejahterakan masyarakat, mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut:



¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4406963/resesi-akibat-pandemi-covid-19-hantam-929-persen-negara-di-dunia>

² <https://money.kompas.com/read/2020/10/08/114000026/pandemi-covid-19-bank-dunia-115-juta-orang-bakal-jatuh-miskin-tertinggi-sejak?page=all>

³ <https://republika.co.id/berita/qkdux6335/pandemi-picu-meningkatnya-kekerasan-pada-perempuan-di-dunia>

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55072850>

⁵ <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/18/085116771/unicef-24-juta-siswa-di-dunia-terancam-putus-sekolah-akibat-pandemi?page=all>

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pencapaian agenda TPB 2030 tentang pengentasan kemiskinan dan kelaparan, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Pandemi ini juga mempengaruhi tujuan TPB lainnya seperti Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Semua ini menunjukkan bahwa penanganan dampak sosial pandemi COVID-19 memerlukan kebijakan dan tindakan yang transformatif, inklusif, dan mengurangi risiko krisis di masa mendatang.

Untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi dampak sosial pandemi COVID-19, SDGs Center Universitas Lampung berkolaborasi dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk melakukan penelitian melalui program LOCALISE SDGs di empat daerah di Indonesia. Lingkup penelitian yang didukung oleh bantuan hibah dari Uni Eropa ini mencakup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Kota Gorontalo dan Kota Mataram.

Rekomendasi Kebijakan

Riset ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada masa pandemi ini. Dari perspektif TPB, ada empat usulan kebijakan untuk mengelola dampak sosial pandemi COVID-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di berbagai daerah di Indonesia:

- Kebijakan kemitraan dan kerja sama dengan berbagai sektor dalam rangka pemulihan dampak sosial pandemi COVID-19 melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru.
- Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, dengan memberikan kesempatan yang setara dalam pelayanan publik.
- Kebijakan membangun sistem dan transformasi digital untuk perlindungan, bantuan, dan keamanan sosial yang responsif.
- Kebijakan investasi data dan kebijakan integrasi untuk merespons krisis dan mendukung percepatan TPB.

Rekomendasi Aksi

Selain itu, ada enam rekomendasi aksi yang diusulkan.

1. Kolaborasi Pentahelix dan Kemitraan dengan Desain Partisipatif

Pencapaian TPB sangat tergantung pada kemitraan dengan para pemangku kepentingan di semua tingkatan. Perlu kolaborasi yang solid, koordinasi vertikal yang konsisten antara otoritas nasional dan lokal, serta koordinasi lintas sektor yang optimal di masing-masing daerah melalui desain partisipatif (*co-design*) para pemangku kepentingan. Pendekatan kolaborasi model *pentahelix* dapat dipakai dengan efektif untuk menangani dampak sosial COVID-19. Model ini melibatkan lima pilar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, masyarakat, dan media massa. Salah satu contohnya adalah Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)⁶ dan Jakarta Development Collaboration Network (JDCN)⁷, jejaring mitra pembangunan lokal dan internasional di DKI Jakarta untuk membangun kota menggunakan model kolaborasi yang berkelanjutan.

⁶ <https://corona.jakarta.go.id/id/platform-ksbb>

⁷ <https://jdcn.jakarta.go.id/>

2. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Bantuan Sosial

Transformasi digital pada pelayanan publik di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, kesehatan, dan jaminan sosial sangatlah penting. Digitalisasi pelayanan publik adalah faktor krusial untuk menyediakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Digitalisasi pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan membangun fondasi untuk pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, dengan tujuan menciptakan kondisi lebih aman, lebih setara, inklusif dan berkelanjutan. Integrasi data kesehatan dasar, sosial dan ekonomi dapat memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan begitu, penduduk yang paling rentan dan paling membutuhkan bantuan dapat terpantau dengan baik. Pelayanan publik dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan aplikasi digital yang memudahkan pemerintah daerah dalam pemberian layanan dan program yang tepat sasaran berbasis data elektronik. Contohnya adalah aplikasi Siap Tanggap (SIAP) yang diujicoba di Kota Semarang pada Juni 2020 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Aplikasi yang mudah digunakan (*user friendly*) ini sangat berguna di periode AKB karena dapat menjangkau masyarakat luas tanpa meningkatkan risiko penularan COVID-19. Tautan (*link*) kuesioner untuk SIAP dikirimkan melalui WhatsApp, dan berisi pilihan ganda sederhana seperti “apakah persediaan makanan mencukupi?”. Aplikasi ini juga merekam data lokasi responden, sehingga kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan mereka dapat dipantau dari jarak jauh.

3. Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Ini adalah saatnya mengedepankan kemitraan, inovasi, dan digitalisasi untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi berbagai lapisan masyarakat. Yang harus diutamakan adalah kaum muda, perempuan, serta kelompok rentan di masyarakat. Ekonomi minim kontak fisik (*less physical contact economy*) juga harus diutamakan. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi secara daring (*online*). Cara lain meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan mendorong tumbuhnya wirausaha, mengadakan program inkubasi bisnis, dan program padat karya seperti Padat Karya Tunai (PKT) atau *Cash for Work*. PKT adalah pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan pendapatan, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan⁸. Beberapa contoh program PKT yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁸ [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-karya-tunai-2#:~:text=Padat%20karya%20tunai%20\(Cash%20for,daya%20beli%2C%20mengurangi%20kemiskinan%2C%20dan](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-skema-padat-karya-tunai-2#:~:text=Padat%20karya%20tunai%20(Cash%20for,daya%20beli%2C%20mengurangi%20kemiskinan%2C%20dan)

(PUPR) ini adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)⁹.

4. Pelatihan Literasi Digital, Layanan Internet, dan Inklusi Digital

Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari sumber yang diakses secara digital. Masyarakat di daerah, terutama perempuan dan kaum muda, sangat membutuhkan pelatihan literasi digital. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan alat digital dan sumber daya daring (*online*), mempermudah aktivitas, memberikan fleksibilitas pekerjaan di masa transisi, sekaligus menyiapkan masa depan pekerjaan mereka. Salah satu contoh program literasi digital adalah Gapura Digital¹⁰ dari Google, program pelatihan yang mendukung pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. Lebih jauh lagi, meningkatnya literasi digital dan hadirnya layanan internet akan mengurangi kesenjangan akses informasi bagi lansia, masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas. Inklusi digital sangatlah penting di masa pandemi ini karena termasuk strategi yang berbiaya rendah, berkelanjutan, dan dapat diskalakan. Inklusi digital di masyarakat pada pasca pandemi COVID-19 sebaiknya fokus pada aktor/pemangku kepentingan. Misalnya, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi digital, khususnya komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku bisnis pariwisata.

5. Investasi Infrastruktur Digital

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kita membutuhkan kepemimpinan, inovasi, serta kolaborasi antar pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Di samping semua faktor krusial tersebut, kita tidak mungkin mencapai TPB tanpa data yang memadai. Investasi pembangunan infrastruktur digital untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan data sangatlah penting. Ditambah, pembangunan infrastruktur digital dapat menciptakan kegesitan (*agility*) dan ketahanan (*resilience*) bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial ekonomi COVID-19. Artinya, dukungan infrastruktur digital dapat memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara maksimal selama pandemi. Pihak swasta dapat digandeng sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur digital ini. Investasi pada pembangunan infrastruktur digital meliputi pembangunan

⁸ <https://www.pu.go.id/berita/view/18595/dorong-pemulihan-ekonomi-nasional-realisisi-belanja-infrastruktur-pupr-tahun-2020-capai-44->

⁹ <https://gapuradigital.withgoogle.com/>

fasilitas pusat teknologi informasi dengan *software* dan *hardware* yang mendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung yaitu pasokan listrik. Pembangunan infrastruktur digital secara otomatis dapat mendukung kesuksesan Satu Data Indonesia (SDI) dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dikelola, diintegrasikan, dan dipertanggungjawabkan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan perluasan infrastuktur digital juga mendukung pemerataan akses internet yang berkualitas bagi masyarakat secara luas.

6. Membangun Kapasitas Digital Aparatur Pemerintah Daerah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu modal utama di era digital. Karena itu, SDM di level pemerintah daerah, harus kompeten dan inovatif di bidang teknologi informasi. Mereka adalah ujung tombak untuk melayani masyarakat serta meningkatkan inovasi di sektor publik. Terutama bagi SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pelayanan publik secara digital. Kemampuan digital para aparatur pemerintah daerah juga akan sangat membantu dalam manajemen data Jaring Pengaman Sosial (JPS), penganggaran, serta sosialisasi program. Ada dua cara utama untuk membangun kapasitas digital aparatur pemerintah daerah, yaitu dengan pelatihan dan pendampingan teknis (*technical assistance*).



KEMITRAAN

Desain partisipatif (*co-design*) dengan para pemangku kepentingan.



LAPANGAN KERJA

Lapangan kerja untuk kaum muda, perempuan dan kelompok rentan.



DIGITALISASI

- Pelayanan publik dan bantuan sosial.
- Pelatihan literasi digital dan layanan internet.



DATA

Infrastruktur digital dan manajemen data.

Membangun Kapasitas Digital SDM pemerintah Daerah

Daftar Pustaka

- Sanjoyo. (2020). *Penyesuaian Strategi, Rencana Aksi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan dan Pencapaian TPB/SDGs di Masa Pandemi COVID-19*. Presentation, Diskusi Daring TPB dan COVID-19 #9: "Penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam Upaya Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19".
- SDGs Center UNILA. (2020). *Penelitian Dampak Sosial COVID-19 di 4 Daerah di Indonesia*.
- United Cities and Local Governments Asia Pacific. (2020). *Apa yang Seharusnya Diketahui Oleh Pemerintah Daerah: Panduan Singkat dan Pembelajaran dari Pemerintah Daerah di Asia*. Jakarta: UCLG ASPAC
- United Nations. (2020). *Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of COVID-19*. New York: United Nations.
- United Nations. (2020). *A UN Framework for the Immediate Socio-economic Response to COVID-19*. New York: United Nations.

Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: secretariat@uclg-aspac.org

Situs : <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>



Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.